

Pengaruh Biaya Hutang, *Corporate social responsibility*, dan Manajemen Laba terhadap *Tax avoidance* dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional

Tsaltsah Hanifah Ardhy¹
Maryati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*Correspondences: tsaltsahhanifahardhy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* berupa biaya hutang, *corporate social responsibility*, dan manajemen laba dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian bersifat kuantitatif dengan populasi berasal dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 dan sampel terpilih menggunakan teknik purposive sampling terdiri dari 32 Perusahaan. Teknik analisis data menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya hutang, manajemen laba dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, kepemilikan institusional memoderasi pengaruh biaya hutang dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*, namun tidak memoderasi *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax avoidance*; Biaya Hutang, *Corporate social responsibility*; Manajemen Laba; Kepemilikan Institusional.

The Effect of Debt Costs, Corporate social responsibility, and Earning Management on Tax avoidance moderated by Institutional Ownership

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing tax avoidance, namely cost of debt, corporate social responsibility (CSR), and earnings management, with institutional ownership as a moderating variable. The research is quantitative in nature, with the population consisting of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The sample was selected using a purposive sampling technique, comprising 32 companies. The data analysis technique employed is Moderate Regression Analysis (MRA). The results of the analysis show that cost of debt, earnings management, and institutional ownership significantly influence tax avoidance, while corporate social responsibility does not significantly affect tax avoidance. Additionally, institutional ownership moderates the effect of cost of debt and earnings management on tax avoidance but does not moderate the effect of corporate social responsibility on tax avoidance

Keywords: *Tax avoidance*; Debt of Cost; corporate social responsibility; Earning Manajemen; Institutional Ownership.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 1
Denpasar, 30 Januari 2025
Hal. 93-109

DOI:
10.24843/EJA.2025.v35.i01.p06

PENGUTIPAN:

Ardhy, T. H., & Maryati.
(2025). Pengaruh Biaya
Hutang, Corporate social
responsibility, dan
Manajemen Laba terhadap
Tax avoidance dimoderasi
oleh Kepemilikan
Institusional.
E-Jurnal Akuntansi,
35(1), 93-109

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
30 Oktober 2024
Artikel Diterima:
29 November 2024

PENDAHULUAN

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Merevisi dan menyempurnakan undang-undang perpajakan Indonesia merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara melalui pajak. Undang-undang perpajakan yang tidak pasti, aturan yang rumit, pelaksanaan kebijakan yang tidak adil, perilaku otoritas pajak, dan kontak dengan wajib pajak lainnya dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak sangat penting bagi pemerintah dan operasi negara, namun Yoon et al. (2021) mengklaim bahwasanya pajak merupakan pengeluaran utama bagi bisnis, khususnya perusahaan besar yang harus membayar pajak yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan pendapatan mereka.

Potensi konflik dalam proses perpajakan tercermin dari perbedaan kepentingan wajib pajak dan pemerintah. Menurut teori *slippery slope*, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya (Yasa et al., 2020). Teori Slippery slope dikenalkan oleh Erich Kirchler pada tahun 2008. Slippery slope theory adalah suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak timbul karena dua faktor utama: kekuatan otoritas (*power of authorities*) dan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authorities*) (Sari & Wulandari, 2024). Perusahaan didorong untuk mengelola tanggung jawab perpajakan mereka melalui berbagai taktik, termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebagai akibat dari konflik kepentingan ini. Taktik ini diterapkan untuk mendukung efisiensi keuangan bisnis dan mengurangi beban pajak secara sah (Mkadmi & Ben Ali, 2024).

Zetira & Suryono (2022) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya organisasi untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang secara sah dengan tetap mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan. Namun jika menyangkut pendapatan negara, *tax avoidance* telah merugikan uang negara yang seharusnya dapat diterapkan untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan nasional dan menutup defisit anggaran (Pramukty et al., 2021). Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara melalui ekspor komoditas pertambangan termasuk batu bara, tembaga, emas, dan nikel, maka pertambangan menjadi salah satu industri yang paling strategis, dan bisnis pertambangan menjadi subjek penelitian ini (Umah, 2021). Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan banyak pelaku usaha pertambangan yang menjalankan *tax avoidance*, sebagaimana yang dilaporkan Kementerian Keuangan bahwasanya banyak Wajib Pajak (WP) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (<https://katadata.co.id/>, 2019).

Beberapa perusahaan pertambangan seperti Glencore (globenewswire.com, 2021), Chevron (ICIJ.org, 2024), PT. Adaro Energy Tbk (finance.detik.com, 2019), dan PT. Aneka Tambang Tbk (finance.detik.com, 2019) telah banyak menjalankan *tax avoidance* baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang menganggap pajak sebagai beban keuangan yang besar. Mereka pun kerap menjalankan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain biaya utang

(Kinait & Ayem, 2021; Rachmat Pramukty et al., 2021; Zamifa et al., 2022; Hasibuan & Purnamasari, 2022), corporate social responsibility (Juliana et al., 2020; Septianto & Muid, 2020; Saputra et al., 2022; Afrilyani & Karina, 2024). manajemen laba (Pajriyansyah & Firmansyah, 2022; Hariseno & Pujiono, 2021; dan Sari, 2023) dan kepemilikan institusional (Zetira & Suryono, 2022; Sinaga et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ardiyanto (2020), Musaddad & Ervina (2022), Zetira & Suryono (2022), dan Novari & Habibah (2022) menyatakan bahwa biaya hutang berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kinait & Ayem (2021), Rachmat Pramukty et al. (2021), Zamifa et al. (2022), dan Hasibuan & Purnamasari (2022) menyatakan bahwa biaya hutang berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septianto & Muid (2020), Juliana et al. (2020), Saputra et al. (2022), dan Afrilyani & Karina (2024) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratu & Meiriasari (2021), Hamdani & Helmy (2023), dan Kurniawan (2024) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2019), Hariseno & Pujiono (2021), dan Sari (2023) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Sari (2022), Purba et al. (2023), dan Arizah et al. (2024) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance, yaitu Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita (2019), Iqbal et al. (2022), Wizanasari (2024), dan Safitri & Arifin (2024). Namun, pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2021), Ananda & Wahyuni (2024), Pratama & Yolanda (2024), dan Noviyanti et al. (2024).

Biaya utang menjadi salah satu pertimbangan untuk menjalankan *tax avoidance* karena utang (selain modal) dapat menjadi sumber pembiayaan eksternal sehingga mampu mengurangi biaya layanan utang (Dewi & Ardiyanto, 2020). Biaya hutang merujuk pada kewajiban perusahaan untuk membayar bunga atas pinjaman atau utang yang dimiliki, seperti obligasi atau pinjaman. Biaya ini dapat memengaruhi risiko kebangkrutan, pengeluaran agensi, dan masalah asimetri informasi yang dihadapi perusahaan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perusahaan sering kali berupaya meminimalkan penggunaan utang, salah satunya dengan menerapkan strategi *tax avoidance* (Duong & Huang, 2022).

berdasarkan atas *slippery slope theory*, tindakan *tax avoidance* melalui biaya hutang menunjukkan bahwasanya wajib pajak secara sadar dan aktif menerapkan utang sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak. Jika strategi ini diterapkan oleh banyak perusahaan, hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang signifikan, jauh dibawah yang diharapkan oleh pemerintah (Istiqomah & Trisnansih, 2022). Menurut Zamifa et al., (2022) ada keuntungan pajak dari utang, yang memungkinkan perusahaan menerapkan utang sampai batas tertentu untuk meningkatkan nilainya. Semakin tinggi biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan, semakin besar pula dorongan bagi perusahaan untuk menjalankan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dari itu ketika biaya hutang meningkat, perusahaan lebih terdorong untuk mencari

strategi penghematan, termasuk melalui *tax avoidance*, guna menjaga stabilitas keuangannya. Sejalan dengan penelitian oleh Pramukty et al., (2021) , Kinait & Ayem, (2021), Zamifa et al., (2022), Hasibuan & Purnamasari, (2022).

H₁: Biaya hutang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi elemen penting dalam bisnis modern, mencerminkan pengakuan terhadap hubungan antara perilaku perusahaan dan kesejahteraan masyarakat (Mkadmi & Ben Ali, 2024). Dalam hal ini CSR mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dalam operasionalnya dan interaksi dengan pemangku kepentingan melalui kemitraan dan kesukarelaan untuk mengatasi masalah yang timbul (Manuel et al., 2022)

Praktik CSR sering kali menjadi indikator bagi perusahaan yang berkomitmen pada strategi yang etis dan ramah lingkungan, serta mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Namun, dalam beberapa kasus, manajer yang bertindak oportunistik dapat memanfaatkan pengungkapan CSR sebagai upaya untuk menutupi kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Metwally et al., 2024). Menurut Afrilyani & Karina, (2024) masih ada perusahaan yang menjalankan *tax avoidance* walaupun memiliki pengungkapan CSR yang baik, hal ini dikarenakan perusahaan yang berinvestasi lebih besar dalam kegiatan CSR mungkin merasa perlu mengimbangi pengeluaran tersebut dengan strategi biaya lainnya, termasuk *tax avoidance*.

Pada *slippery slope theory*, CSR mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Menurut Tahar & Rachmawati, (2020) *tax avoidance* mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Maka dari itu, implementasi CSR yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, sambil tetap menjaga citra sosial yang positif. Maka dari itu, *tax avoidance* cenderung meningkat ketika perusahaan mengintensifkan penerapan aktivitas CSR dalam operasional bisnisnya (Duong & Huang, 2022). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana et al., (2020), Septianto & Muid, (2020), Saputra et al., (2022) dan Afrilyani & Karina, (2024).

H₂: *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pelaporan keuangan ialah alat tertinggi bagi manajemen untuk menilai kinerja perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (MacCarthy, 2021), dan juga laporan keuangan dapat mencerminkan strategi yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi pajak terutanganya (Kaldoński & Jewartowski, 2020). Menurut Henny (2019) manajemen menyesuaikan laba yang dilaporkan untuk mengurangi beban pajak. Maka dari itu, dorongan membayar pajak memicu praktik manajemen laba, dimana perusahaan memanipulasi laporan keuangan untuk menurunkan atau menaikkan pendapatan (Octavia & Sari, 2022).

Manajemen laba ialah upaya perusahaan untuk memanipulasi laba yang dilaporkan dengan menerapkan metode akuntansi tertentu, seperti penyusutan atau pengakuan pendapatan dan biaya yang dipercepat, untuk memengaruhi laba jangka pendek. Praktik ini sering disebut sebagai akrual diskresioner atau akrual abnormal, yang dapat dimanipulasi oleh manajer didasarkan atas kebijaksanaan mereka (MacCarthy, 2021). Dalam konteks *slippery slope theory*, jika pengelolaan laba yang tidak transparan dapat berkembang menjadi manipulasi yang lebih

serius seiring dengan berjalannya waktu, terutama dalam kondisi yang kurang diawasi secara ketat (Manurung & Harahap 2022). Dengan demikian, manajemen akan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kepentingannya (Istiqomah & Trisnarningsih, 2022). Sejalan dengan penelitian yang dijalankan Pajriyansyah & Firmansyah, (2022), Hariseno & Pujiono, (2021) dan Sari, (2023) yang menyatakan ketika manajemen laba meningkat, *tax avoidance* juga cenderung meningkat.

H₃: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Istilah "kepemilikan institusional" menggambarkan kepemilikan saham perusahaan oleh organisasi yang mengawasi operasinya (Noviyanti et al., 2024). Penjualan saham perusahaan oleh entitas seperti pemerintah, lembaga asing, dana perwalian, asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lain-lain dikenal sebagai kepemilikan institusional, menurut Pratama & Yolanda (2024). Kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan bahwasanya bisnis tersebut dikelola dengan baik. (Minh Ha et al., 2022). Dapat lebih efektif dalam memantau keputusan *tax avoidance* untuk mengurangi masalah perusahaan dan memastikan pengawasan terhadap tindakan manajerial (Lastyanto & Setiawan, 2022).

Tax avoidance merupakan salah satu keputusan strategis yang sangat penting bagi perusahaan (Kim et al., 2019). Karena *tax avoidance* memiliki dampak yang menguntungkan bagi nilai perusahaan (Minh Ha et al., 2022). Dalam *slippery slope theory* terdapat konflik kepentingan dimana kewajiban pajak tersebut bisa mengurangi sepertiga laba perusahaan (Kim et al., 2019), *tax avoidance* memungkinkan pengalihan nilai tersebut dari pemerintah kepada pemegang saham (Minh Ha et al., 2022). Maka dari itu, kepemilikan institusional yang signifikan akan mungkin mereka lebih berfokus pada peningkatan profitabilitas dan nilai saham, sehingga mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi *tax avoidance* demi memenuhi ekspektasi kinerja yang lebih tinggi (Safitri & Arifin, 2024). Sejalan dengan penelitian oleh Putri & Lawita (2019), Iqbal et al., (2022), Wizanasari (2024) dan Safitri & Arifin (2024).

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Menurut Wizanasari (2024), Lastyanto & Setiawan (2022) dan Noviyanti et al (2024) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki otoritas signifikan dalam mengontrol keputusan strategis perusahaan, termasuk *tax avoidance*. Kimea et al., (2023) menjelaskan bahwasanya *tax avoidance* menjadi agenda penting manajemen karna bisa meningkatkan efisiensi kas perusahaan. Menurut Duong & Huang (2022) biaya hutang berdampak pada risiko kebangkrutan, dan asimetri informasi. Untuk mengurangi dampak tersebut, perusahaan sering memanfaatkan strategi bebas pajak, termasuk *tax avoidance*, guna meminimalkan beban hutang. Maka dari itu, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memanfaatkan *tax avoidance* untuk mengelola dampak risiko biaya hutang seperti risiko kebangkrutan. Sejalan dengan penelitian oleh Zetira & Suryono (2022) dan Sinaga et al., (2023).

H₅: Kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan biaya hutang terhadap *tax avoidance*

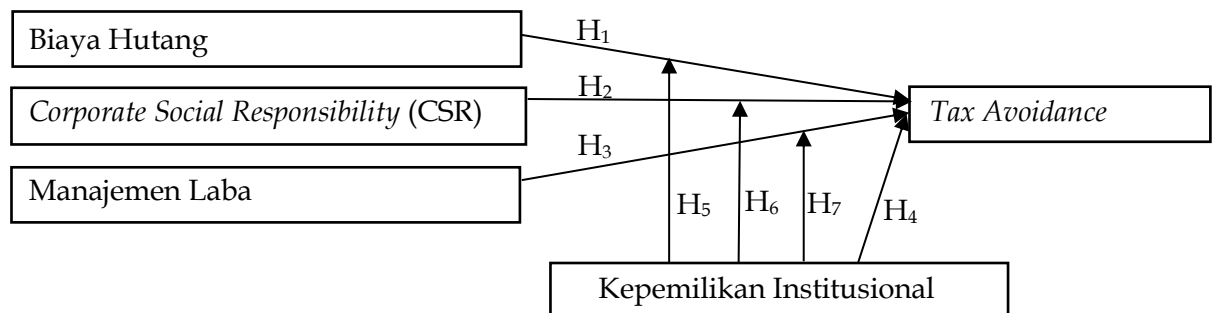
Afrilyani & Karina (2024) menjelaskan bahwa CSR diterapkan perusahaan sebagai strategi untuk membangun dan mempertahankan citra positif dan memperkuat kepercayaan dari masyarakat, pelanggan, investor dan pihak lainnya

yang berkepentingan. Menurut Safitri & Arifin (2024) kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi dan mengarahkan kebijakan perusahaan. Duong & Huang (2022) menjelaskan csr diterapkan untuk membangun kepercayaan demi meningkatkan keuntungan perusahaan dan memanfaatkan insentif pajak yang terkait dengan pengeluaran sosial sehingga perusahaan bisa mengurangi kewajiban pajak mereka. Maka dari itu kepemilikan institusional yang signifikan bisa membantu menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial. Sejalan dengan Firdayanti & Kiswanto (2020).

H₆: Kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan CSR terhadap *tax avoidance*

Manajemen laba ialah tindakan manajemen untuk memengaruhi laporan laba dengan metode akuntansi tertentu (MacCarthy, 2021). Menurut Octavia & Sari (2022) manajemen laba dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meminimalkan beban pajak. Kimea et al., (2023) menjelaskan kepemilikan institusional yang baik mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas, salah satunya dengan meminimalkan pajak yang dibayar. Maka dari itu kepemilikan institusional yang kuat berfokus pada peningkatan nilai dan efisiensi operasional sehingga *tax avoidance* dijalankan untuk tujuan jangka panjang perusahaan melalui strategi manajemen laba. Sejalan dengan penelitian Ardiyansyah (2023).

H₇: Kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan manajemen laba terhadap *tax avoidance*



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel penelitian selama kurun waktu 2019-2023. Sampel ini dipilih didasarkan atas metode purposive sampling, dimana sampel diambil didasarkan atas karakteristik atau kriteria khusus mencakup perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023, perusahaan harus mengalami keuntungan selama periode 2019-2023, ketersediaan laporan tahunan, laporan keuangan perusahaan tersedia secara lengkap, terutama yang terkait dengan variabel yang menjadi fokus penelitian.

Tabel 1. Tabel Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023	121
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2019-2023	(33)
3.	Perusahaan yang tidak mengalami laba secara berturut turut selama periode 2019-2023	(53)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variable dipenelitian selama periode 2019-2023	(3)
Total Sampel		32
Jumlah Pengamatan (x 5 Tahun)		160

Sumber: Data Penelitian, 2024

Penelitian ini menerapkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan. Metode pengumpulan data dijalankan melalui observasi non partisipan, dengan informasi yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan.

Tabel 2. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator Pengukuran
<i>Tax avoidance</i>	Pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Afrilyani & Karina, 2024).
Biaya Hutang	Beban bunga perusahaan dibagi dengan total rata-rata liabilitas (Dewi & Ardiyanto, 2020).
<i>Corporate social responsibility (CSR)</i>	Total indikator yang diungkapkan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah kriteria pengungkapan (Saputra et al., 2022).
Manajemen Laba	menerapkan rumus discretionary accrual didasarkan atas model jones (Sari, 2023).
Kepemilikan Institusional	Total kepemilikan saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar (Wizanasari, 2024).

Sumber: Data Penelitian, 2024

Metode analisis data yang diterapkan ialah uji MRA dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Teknik ini diterapkan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, serta peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antar keduanya. Dalam penelitian ini juga menguji bagaimana pengaruh variabel moderasi terhadap variabel dependen (Suripto & Hakim, 2024). Model persamaan MRA yang diterapkan ialah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 Z + b_5 X_1.Z + b_6 X_2.Z + b_7 X_3.Z + e.....(1)$$

Y = *Tax avoidance*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Biaya hutang

X2 = *Corporate social responsibility*

X3 = Manajemen Laba

Z = Kepemilikan Institusional

X1.Z = Interaksi biaya hutang dengan kepemilikan institusional

X2.Z = Interaksi *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional

X3.Z = Interaksi manajemen laba dengan kepemilikan institusional
e = Standard error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberi gambaran mengenai data dengan menghitung nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, jumlah total (sum), rentan (range), serta ukuran distribusi seperti kurtosis dan skewness. Analisis ini umumnya diterapkan untuk menggambarkan karakteristik data sampel sebelum menerapkan metode analisis statistik lainnya untuk menguji hipotesis (Paramita et al., 2021).

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
X1	160	0,000	0,187	0,056	0,047
X2	160	0,179	0,914	0,581	0,205
X3	160	-5,953	10,541	0,238	1,497
Z	160	0,059	0,994	0,701	0,210
Y	160	-0,193	0,775	0,258	0,166

Sumber: Data Penelitian, 2024

berdasarkan Tabel 3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan jumlah observasi sebanyak 160 dengan sampel 32 perusahaan. Variabel biaya hutang (X1) bernilai rata-rata 0,0562 > nilai standar deviasi sejumlah 0,047705 mengindikasikan bahwasanya data memiliki tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai maksimum biaya hutang sejumlah 0,187900 yang terjadi pada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk ditahun 2021. Nilai minimum sejumlah 0,00003 yang terjadi pada PT. Alakasa Industrindo Tbk. ditahun 2020. Nilai rata-rata yang jauh dari nilai minimum berarti bahwasanya rata-rata biaya hutang pada perusahaan sampel tinggi.

Variabel CSR (X2) bernilai rata-rata 0,0581723 > nilai standar deviasi sejumlah 0,025539 mengindikasikan bahwasanya data memiliki tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai maksimum CSR 0,914500 yang terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk ditahun 2023. Nilai minimum sejumlah 0,179500 tercatat pada PT Mitra Energi Persada Tbk ditahun 2019. Nilai rata-rata yang jauh dari nilai minimum menunjukkan bahwasanya rata-rata pengungkapan CSR pada perusahaan sampel tinggi.

Variabel manajemen laba (X3) bernilai rata-rata 0,238731 dengan standar deviasi yang cukup tinggi sejumlah 1,497827 yang menunjukkan tingkat variasi data yang sangat tinggi. Nilai maksimum tercatat sejumlah 10,54120 dimiliki oleh PT Bayan Resources Tbk ditahun 2021. Nilai minimum sejumlah -5,953100 dimiliki oleh PT Bayan Resources Tbk ditahun 2022. Nilai rata-rata yang sangat jauh dari nilai minimum menunjukkan bahwasanya rata-rata penggunaan manajemen laba pada perusahaan sampel sangat tinggi.

Variabel kepemilikan institusional (Z) bernilai rata-rata 0,701020 > nilai standar deviasi sejumlah 0,210406 yang menunjukkan bahwasanya data memiliki tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai maksimum sejumlah 0,994500 terjadi pada PT Ifishdeco Tbk ditahun 2023. Nilai minimum sejumlah 0,059700 terjadi pada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk

ditahun 2019. Nilai rata-rata yang jauh dari nilai minimum menunjukkan bahwasanya pada sebagian besar perusahaan sampel memiliki tingkat kepemilikan institusional yang relatif tinggi.

Variabel *Tax avoidance* (Y) bernilai rata-rata 0,2584 > nilai standar deviasi sejumlah 0,1670 yang menunjukkan bahwasanya data memiliki tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai maksimum sejumlah 0,775200 yang terjadi pada PT Mitra Energi Persada Tbk ditahun 2020. Nilai minimum sejumlah -0,193100 yang terjadi pada PT Prima Sejahtera Abadi Tbk ditahun 2020. Nilai rata-rata yang jauh dari nilai minimum menunjukkan bahwasanya pada sebagian besar perusahaan sampel memiliki tingkat *tax avoidance* yang relatif tinggi.

Sebelum dijalankan analisis MRA, uji asumsi klasik harus dijalankan terlebih dahulu. Priyatno (2022) menyatakan bahwasanya uji asumsi klasik bertujuan guna memastikan bahwasanya data yang diperoleh sesuai untuk dianalisis dengan metode analisis MRA. Uji asumsi klasik yang diterapkan mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas	Uji Multikolinieritas		Uji Heteroskedastisitas	Uji Autokorelasi
	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	VIF	<i>Tolerance</i>	Uji Glejser	Durbin-Watson
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,711876				
X1		1,075	0,930	0,0680	
X2		1,019	0,981	0,2074	
X3		1,015	0,985	0,8057	
Z		1,053	0,949	0,5210	
Durbin Watson					1,8350

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 4 memperlihatkan hasil pengujian normalitas yang dijalankan mendapat nilai sig. (2-tailed) 0,711876 > nilai signifikan 0,05 maka bisa diambil simpulan bahwasanya penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal. didasarkan atas hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance seluruh variabel > 0,1 dan nilai VIF seluruh variabel < 10 maka bisa diambil simpulan seluruh variabel dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. didasarkan atas uji heteroskedastisitas menerapkan uji glejser menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel > taraf signifikan 0,05 sehingga bisa diambil simpulan seluruh variabel dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. didasarkan atas hasil uji Durbin Watson ditabel 4 memperoleh nilai 1,8350 dengan taraf signifikan sejumlah 0,05 dengan jumlah observasi = 160, dan jumlah variabel bebas 4. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini ialah $1,7798 < 1,8350 < 2,2202$, sehingga bisa diambil simpulan seluruh variabel dipenelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi.

Setelah memenuhi uji asumsi klasik, langkah berikutnya ialah menjalankan uji MRA. Uji ini bertujuan guna menguji pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen serta untuk menilai peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara keduanya.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Moderasi

Model		B	t	Sig
1	(Constanta)	2,525	2,584	0,014
	X1	4,147	2,195	0,035
	X2	0,131	1,049	0,302
	X3	0,017	4,564	0,001
	Z	5,300	2,190	0,036
	X1.Z	10,527	2,253	0,031
	X2.Z	0,203	0,891	0,379
	X3.Z	0,003	3,288	0,025
	Adjusted R Square	0,605		
	F Hitung	33,355		
	Sig. F	0,000		

Sumber: Data Penelitian, 2024

berdasarkan hasil analisis regresi moderasi yang disajikan pada Tabel 5 maka persamaan regresi penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 2,525 + 4,147X_1 + 0,131X_2 + 0,017X_3 + 5,300Z + 10,527X_1.Z + 0,203X_2.Z + 0,003X_3.Z + e \dots \dots \dots (2)$$

Nilai konstanta menunjukkan angka sejumlah 2,525 yang mengartikan bahwa jika variabel independent yakni biaya hutang, *corporate social responsibility* dan manajemen laba beserta variabel moderasi yakni kepemilikan insitusalional dan juga variabel interaksi yang terbentuk antara variabel independen dan variabel moderasi bernilai 0, maka praktik perusahaan dalam menjalankan *tax avoidance* sejumlah 2,525. didasarkan atas hasil uji F ditabel 5 diperoleh nilai signifikan F yakni sejumlah $0,000 < \text{nilai signifikan} (0,000 < 0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwasanya variabel biaya hutang (X1), *corporate social responsibility* (X2), manajemen laba (X3), variabel kepemilikan institusional (Z), variabel interaksi antara biaya hutang dengan kepemilikan institusional, variabel interaksi antara *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional, variabel interaksi antara manajemen laba dengan kepemilikan institusional secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 5 nilai *Adjusted R Square* (R²) yang diperoleh ialah 0,605 atau 60,5 persen. Ini menunjukkan bahwasanya variabel *tax avoidance* bisa dipengaruhi oleh variabel biaya hutang, *corporate social responsibility*, manajemen laba, variabel interaksi antara biaya hutang dengan kepemilikan institusional, variabel interaksi antara *corporate social responsibility* dengan kepemilikan institusional, variabel interaksi antara manajemen laba dengan kepemilikan institusional sejumlah 60,5 persen, sementara sisanya sejumlah 39,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan kedipenelitian ini.

Hipotesis pertama (H1) mengemukakan bahwasanya biaya hutang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis ditabel 5 menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi untuk variabel biaya hutang (X1) ialah $0,035 < 0,05$ (taraf signifikan), yang berarti biaya hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Hal tersebut berarti bahwasanya tingkat biaya hutang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menjalankan *tax avoidance*. Pengaruh positif tersebut diduga

ketika perusahaan memiliki biaya hutang yang lebih tinggi, mereka bisa memanfaatkan pengurangan pajak ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. karna dalam hal ini *tax avoidance* diterapkan untuk mempertahankan stabilitas finansial dengan mengurangi kewajiban pajak yang berkaitan dengan utang yang diterapkan perusahaan (Ballesta & Yagüe, 2023). Pada konteks teori *slippery slope* menjelaskan bahwasanya ketika perusahaan memiliki biaya hutang yang tinggi, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk menjalankan *tax avoidance* tanpa menghadapi konsekuensi yang berat, terutama ketika kekuatan otoritas melemah. Sejalan dengan penelitian Pramukty et al., (2021) , Kinait & Ayem, (2021), Zamifa et al., (2022), Hasibuan & Purnamasari, (2022).

Hipotesis kedua (H2) mengemukakan bahwasanya *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis ditabel 5 menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi untuk variabel *corporate social responsibility* (X2) ialah $0,302 > 0,05$ (taraf signifikan), yang berarti *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak. Tidak berpengaruhnya *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* diduga karena tingkat *corporate social responsibility* pada perusahaan sangat tinggi pada sampel perusahaan jika dilihat pada statistik deskriptif. Menurut Duong & Huang (2022) perusahaan dengan tingkat aktivitas sosial yang tinggi cenderung tidak menjalankan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh pengungkapan CSR yang tinggi, mencerminkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial dan kewajiban untuk membayar pajak (Saputra et al., 2022). Pada konteks *slippery slope* tingginya aktivitas CSR menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak. Maka dari itu, perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik cenderung menjaga hubungan positif dengan pemerintah, yang mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ratu & Meiriasari (2021), Hamdani & Helmy (2023) dan Kurniawan (2024).

Hipotesis ketiga (H3) mengemukakan bahwasanya manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis ditabel 5 menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi untuk variabel manajemen laba (X3) ialah $0,001 < 0,05$ (taraf signifikan), yang berarti manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal tersebut diduga karena perusahaan dengan sengaja menurunkan laba untuk mengurangi kewajibannya karena laba menjadi dasar dalam perhitungan beban pajak perusahaan (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022). Maka semakin tinggi praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk menjalankan *tax avoidance* (MacCarthy, 2021). Sejalan dengan teori *slippery slope* perusahaan cenderung memanfaatkan kelemahan otoritas dalam peraturan akuntansi dan perpajakan untuk memilih metode akuntansi yang bisa diterapkan untuk menurunkan beban pajak namun laba yang dilaporkan tetap terlihat. Sejalan dengan penelitian oleh Pajriyansyah & Firmansyah, (2022), Hariseno & Pujiono, (2021) dan Sari, (2023).

Hipotesis keempat (H4) mengemukakan bahwasanya kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis ditabel 5 menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan institusional (Z) ialah $0,036 < 0,05$ (taraf signifikan), yang berarti kepemilikan

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis ke empat (H4) diterima. Hal tersebut diduga karna tingginya rata-rata kepemilikan institusional yang bisa di lihat dari uji statistik deskriptif yang berarti bahwasanya sampel perusahaan yang diterapkan rata-rata dimiliki oleh pihak institusi. Tingginya kepemilikan institusional memungkinkan perusahaan hanya akan berfokus pada peningkatan profitabilitas dan nilai saham (Wizanasari, 2024). Karena menurut Kim et al., (2019) *tax avoidance* dianggap sebagai pengurang pendapatan bagi pemegang saham. Maka bisa diambil simpulan ketika kepemilikan institusional tinggi praktek *tax avoidance* juga tinggi. Dalam teori *slippery slope*, tingginya kepemilikan institusional bisa menggeser fokus perusahaan dari kewajiban membayar pajaknya kepada memaksimalkan kepentingan pemegang saham, karena tingginya kepemilikan institusional membuat perusahaan cenderung lebih agresif dalam praktik *tax avoidance* (Minh Ha et al., 2022). Sejalan dengan penelitian Putri & Lawita (2019), Iqbal et al., (2022), Wizanasari (2024) dan Safitri & Arifin (2024).

Hipotesis kelima (H5) mengemukakan bahwasanya kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan biaya hutang terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis ditabel 5 menunjukkan bahwasanya nilai signifikan sejumlah $0,031 < 0,05$ (taraf signifikan), yang berarti bahwasanya kepemilikan institusional berperan dalam memoderasi hubungan antara biaya hutang dan *tax avoidance*, sehingga hipotesis kelima (H5) diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwasanya perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan biaya hutang sebagai alat untuk mengurangi beban pajak (Minh Ha et al., 2022). Dalam teori *slippery slope* yang menyatakan bahwasanya interaksi antara pemerintah sebagai pengawas pajak yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kekuasaan, namun kepemilikan institusional yang tinggi mencerminkan struktur kepemilikan yang lebih terorganisir, yang memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif memanfaatkan kebijakan perpajakan, seperti pengurangan beban pajak melalui bunga atas biaya hutang (Zetira & Suryono, 2022). Sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Zetira & Suryono (2022) dan Sinaga et al., (2023).

Hipotesis keenam (H6) menyatakan bahwasanya kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan CSR dan *tax avoidance*. Hasil analisis ditabel 5 menunjukkan nilai signifikan sejumlah $0,379 > 0,05$ (taraf signifikan), ini menunjukkan bahwasanya kepemilikan institusional tidak bisa memoderasi hubungan antara CSR dan *tax avoidance* sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak. Hal tersebut diduga CSR dan kepemilikan institusional memiliki fokus tujuan yang berbeda di dalam perusahaan. Menurut Mkadmi & Ali (2024) CSR bertujuan guna menciptakan keseimbangan antara tujuan bisnis dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. sementara kepemilikan institusional cenderung berfokus pada peningkatan profitabilitas (Wizanasari, 2024). Perbedaan fokus ini lah yang menjadi tidak berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap hubungan CSR dengan *tax avoidance*, dalam konteks *slippery slope theory* ketika fokus kepemilikan institusional lebih diarahkan pada profitabilitas, perusahaan mungkin mengabaikan tujuan CSR dalam membangun kepercayaan sosial dimana kepercayaan dan kerja sama menjadi

kunci dalam mendorong kepatuhan pajak (Hamdani & Helmy, 2023). Sejalan dengan penelitian Ristanti (2022) dan Hamdani & Helmy (2023).

Hipotesis ketujuh (H7) menyatakan kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis ditabel 5 memperoleh nilai signifikan sejumlah $0,025 < 0,05$ (taraf signifikan), sehingga menyatakan bahwasanya kepemilikan institusional memoderasi hubungan manajemen laba dengan *tax avoidance* maka hipotesis ke tujuh (H7) diterima. Hal ini diduga karena tingginya tingkat kepemilikan institusional memungkinkan perusahaan untuk lebih bebas dalam menerapkan praktik manajemen laba yang agresif demi kepentingan pemegang (John). Praktik ini dianggap menguntungkan, karena kekayaan pemegang saham meningkat melalui penghematan pajak, mengingat pajak penghasilan bisa mengambil sekitar sepertiga dari laba sebelum pajak perusahaan (Kim et al., 2019). Dalam konteks *slippery slope theory* tingginya tingkat kepemilikan institusional membuat perusahaan hanya fokus pada optimalisasi keuntungan saja, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepatuhan sukarela terhadap pajak, mengingat perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak (Sari, 2023). Sejalan dengan penelitian Ardiyansyah (2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh positif antara biaya hutang dan *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Perusahaan memanfaatkan biaya bunga dari hutang untuk mengurangi beban pajak, sebagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan. *Corporate social responsibility* (CSR) tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini berarti bahwasanya meskipun perusahaan memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi, mereka tetap berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan kesadaran membayar pajak yang dianggap penting untuk menjaga hubungan positif dengan pemerintah dan masyarakat. Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan yang menjalankan manajemen laba cenderung juga menjalankan *tax avoidance* untuk mengurangi kewajibannya, perusahaan ini memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan akuntansi dan perpajakan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Yang berarti bahwasanya perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih sering terlibat dalam strategi *tax avoidance* demi meningkatkan nilai saham dan keuntungan pemegang saham.

Kepemilikan institusional memoderasi hubungan biaya hutang terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwasanya struktur kepemilikan institusional yang terorganisir membuat perusahaan lebih efektif dalam memanfaatkan kebijakan perpajakan terkait pengurangan pajak dari biaya hutang. Kepemilikan institusional tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan CSR dan *tax avoidance*. Hal ini diduga karena perbedaan fokus antara CSR yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta kepemilikan institusional yang lebih berorientasi pada profitabilitas. Kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan antara manajemen laba dan *tax avoidance*. Tingginya

kepemilikan institusional memungkinkan perusahaan lebih bebas menerapkan praktik manajemen laba yang agresif, yang secara tidak langsung meningkatkan intensitas penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung teori *slippery slope*, yang menjelaskan bahwasanya penghindaran pajak terjadi karena interaksi kompleks antara kepercayaan, kekuatan otoritas, dan tujuan masing-masing pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel yang hanya mencakup perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 yang memengaruhi data keuangan perusahaan juga menjadi salah satu kendala yang bisa memengaruhi hasil penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar sektor industri yang dianalisis lebih diperluas, serta menjalankan pengamatan pada periode pasca-pandemi untuk mendapat data yang lebih representatif. Selain itu, peneliti diharapkan bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tata kelola perusahaan atau regulasi perpajakan yang bisa memperkaya analisis penelitian.

REFERENSI

- Afrilyani, R., & Karina, R. (2024). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba*. 770-784. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Agustina Putri, A., & Fathurrahmi Lawita, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68-75.
- Ardiyansyah, M, A. M. (2023). *KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI MODERASI: Pengaruh Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak*. 1-14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Duong, T.-Q., & Huang, Y.-C. (2022). The Mediation Effects Of Tax Avoidance Between Esg And Cost Of Debt , Firm Value : Evidence From Asean Listed Corporations Introduction Not Only The Whole World Will Continue To Fight The Resurgent Covid-19 Pandemic , But We Also Have To Deal With The Wra. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 10(2S2), 201-232. <http://scientificia.com/index.php/JEBE/article/view/198>
- Firdayanti, N., & Kiswanto, K. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2), 42-52. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4280>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1192-1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Hariseno, & Pujiono. (2021). Pengaruh Praktik Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1365-1371.
- Hasibuan, R., & Purnamasari, I. (2022). Pengaruh Biaya Utang Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 6(1), 74-87. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol6no1.pp74-87>
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.4021>
- Iqbal, Anindya, D. A., & Pane, A. A. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 1(1), 80-94. <https://doi.org/10.31289/jbi.v1i1.1063>
- Istiqomah, A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 160-172. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2194>
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257-1271.
- Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2020). Do firms using real earnings management care about taxes? Evidence from a high book-tax conformity country. *Finance Research Letters*, 35(November 2019), 101351. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101351>
- Kim, I., Hasan, I., Teng, H., & Wu, Q. (2019). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: international evidence. *Bank of Finland Research Discussion Papers*, No. 26/2019.
- Kimea, A. J., Mkhize, M., & Maama, H. (2023). The Sociocultural and Institutional factors influencing Tax Avoidance in sub-Saharan Africa. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2186744>
- Kinait, T., & Ayem, S. (2021). Pengaruh Biaya Hutang, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2016-2019). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 303-317. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6329>
- Kurniawan, F. D. (2024). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity, Terhadap Penghindaran Pajak*. 5(1), 347-358.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27-40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- MacCarthy, J. (2021). Effect of earnings management and deferred tax on tax avoidance: Evidence using modified Jones model algorithm. *Corporate Ownership and Control*, 19(1, special issue), 272-287. <https://doi.org/10.22495/cocv19i1siart5>
- Manuel, D., Sandi, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 550-

560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1832>
- Metwally, A. B. M., Elsharkawy, A. A. M., & Salem, M. I. (2024). The impact of corporate social responsibility on operating cash flow opacity: the moderating role of tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2390692>
- Minh Ha, N., Phuong Trang, T. T., & Vuong, P. M. (2022). Relationship between tax avoidance and institutional ownership over business cost of debt. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026005>
- Mkadmi, J. E., & Ben Ali, W. (2024). How does tax avoidance affect corporate social responsibility and financial ratio in emerging economies? *Journal of Economic Criminology*, 5(December 2023), 100070. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100070>
- Novita Sari, E., & Wulandari, S. (2024). Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Governance (JAGO)*, 4(2), 164. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v3i1.2078>
- Noviyanti, S. D., Nadi, L., Pamulang, U., Institusional, K., & Modal, I. (2024). *Brilian Dinamis Akuntansi Audit Brilian Dinamis Akuntansi Audit*. 6(1), 48–70.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Pajriyansyah, R.-, & Firmansyah, A.-. (2022). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Priyatno, D. (2022). *ANALISIS REGRESI DATA PANEL DENGAN EVIEWS*.
- Putri Setya Dewi, A., & Didik Ardiyanto, M. (2020). PENGARUH BIAYA UTANG DAN RISIKO PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 9(3), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rachmat Pramukty, Wastam Wahyu Hidayat, Desy Arigawati, & Kardinah Indrianna Meutia. (2021). Pengaruh Cost of Debt Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 31–35. <https://doi.org/10.31599/jiam.v17i1.551>
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 127–130. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v12i2.1525>
- Ristanti, L. (2022). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 50–62. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.22>
- Safitri, E., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Komisaris Independen , Financial Distress terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan

- Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-20. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 340-357.
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2023). Tax avoidance and the cost of debt for SMEs: Evidence from Spain. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 19(2), 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100362>
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Sari, H. W. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Manajemen Laba , Komisaris Independen , Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Septianto, N. A., & Muid, D. (2020). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PERUSAHAAN. 9, 1-13.
- Sinaga, A. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). Pengaruh Cost of Debt terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2019-2021. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 56-67.
- Suripto, & Hakim, D. R. (2024). Does corporate social responsibility moderate the effect of earnings performance and institutional ownership on corporate tax avoidance ? 25(3). <https://doi.org/10.18196/jai.v25i3.22124>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98-115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Wizanasari. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. 7(1), 366-379.
- Zamifa, F., Hasanah, N., & Khairunnisa, H. (2022). Pengaruh Biaya Utang dan Risiko Pajak Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6612>
- Zetira, P. M., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Biaya Hutang terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/issue/view/199>